

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny Puspaningtyas, & Radjikan Radjikan. (2021). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Peningkatan Perekonomian Desa Mojomalang Melalui Penguatan UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara [ISSN : 2303-0089 e-ISSN : 2656-9949]*.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bupati. (2022). *Keputusan Bupati Nomor 188/201/K/411.013/2022 tentang perubahan keputusan Bupati Nganjuk Nomor 183/173/K/ 411.012/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Tata Pengelolaan Keuangan Desa*. Bupati Nganjuk.
- Bailah. (2019). *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Eryana, E. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 89–95.
- Indriani, Claudia. (2021). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Laode Suaparno. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 3.
- Nungky Adeliya, Rohmad Widodo, & Nurul Zuriah. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864>

- Mahmudi (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2015). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Malhotra, Naresh K. (2010). *Riset Pemasaran (Marketing Research)*. New Jersey, Indonesia: PT. Indeks.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nurhadianto, Toni, Nur Khamisah. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Technobiz : International Journal of Business*. Vol.3 (5). P.25-29.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Permendagri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1)*.
- Permenkop UKM No. 20/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang *Penerapan Akuntabilitas Koperasi*.
- Susanti Yuliandari. (2021). *Monitoring Dan Evaluasi Survei IPK Dan IKM Oleh Kanwil DIY*.
- Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- tirto.id. (2023). *Dua Sisi Dana Desa Menunjang Pembangunan Tapi Rawab Dikorupsi*. Tirto.Id.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Waridah, Siti. (2014). *Sosiologi*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Willy Medi Christian Nababan. (2023). *Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat*. Kompas.Id.
- Wiratna, Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wulandari, Ika (2020) *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso*. Tesis. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

Zamroni. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.